

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KORUPSI, PERTUMBUHAN EKONOMI , DAN KEMISKINAN: SUATU STUDI LINTAS NEGARA¹

Joko Waluyo²

Abstract

The phenomenon of high corruption is a problem that many in developing countries. The economic growth is expected to reduce poverty and improve quality through the mechanism of trickle-down effect. The requirement for sustainable economic growth is to control the system of governance and equity. The objectives of the research are to improve understanding of the relationship between corruption, poverty, and economic growth based on cross-country data. The technique used panel data analysis with cross-country data. The main data sources are secondary data publication results. International Country Risk Guide (ICRG), Business International (BI), Transparency International (TI), and World Bank. The analysis showed that: 1) Poverty has no impact on economic growth, 2) Corruption has no impact on economic growth, but economic growth gives impact on corruption, 3) Poverty has no impact on corruption, and corruption has no impact on poverty, 4) The combination of poverty and corruption has an impact on economic growth, 5) The combination of poverty and economic growth gives impact on corruption. The advice can be given, among others: 1) poverty and corruption need to be considered as an important variable in forecasting economic growth in the future, 2) We recommend that in future research use data corruption that comes from the same source to avoid bias in interpretations, 3) In further research models can be augmented by including macroeconomic variables such as inflation, population, and education level as control variables.

Keywords: Corruption, Economic Growth, Poverty, Causality

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi tinggi merupakan permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara sedang berkembang. Lemahnya birokrasi dan penegakan hukum dituding sebagai penyebab utama korupsi di banyak negara (Klitgard, 1988, 2000). Secara ekonomi maraknya *rent seeking* dan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: adanya hambatan perdagangan internasional, pengawasan harga oleh pemerintah, diberlakukannya *multiple exchange rate*, dan rendahnya gaji pegawai negeri (Mauro, 1997, Ginting, 1999). Dampak korupsi sangat luas antara lain: terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi domestik/asing, penerimaan pajak, dan miss alokasi anggaran pemerintah. Fakta empiris menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik/asing adalah

¹ Penelitian ini dibiayai DIPA Nomor: 0428/Kop.V/A.1/III/2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

² Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, email : mrwaluyo@upnyk.ac.id

negatif dan signifikan, sedangkan terhadap penerimaan pajak dan miss alokasi anggaran pemerintah berdampak positif dan signifikan (Mauro, 1985 dan 2004, Knack and Keefer, 1995, Rodrick, 1996, dan Dewi, 2002).

Pada sisi yang lain pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan melalui mekanisme *trickle down effect*. Lemahnya modal kapital dan modal manusia yang disebabkan oleh kurangnya akses ke lembaga keuangan dituding sebagai penyebab utama kemiskinan di negara sedang berkembang (Deininger, 2000, dan Waluyo, 2004). Model ekonomi (*economic model*) memberikan petunjuk bahwa korupsi akan berdampak langsung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan model pemerintahan (*government model*) mengindikasikan bahwa keberadaan korupsi akan mengurangi anggaran negara, sehingga penyediaan barang publik menjadi berkurang pula. Melemahnya anggaran negara akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi (Chetwind at all, 2003).

Syarat utama yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah dapat mengendalikan tata kelola pemerintahan dan sistem equitas. Persyaratan penting tersebut tidak mudah dilaksanakan baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Sebagian besar negara telah mempunyai undang-undang dan peraturan untuk melindungi sistem perekonomian negara tersebut dari kondisi resesi yang menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi (Tanner dan Liu, 1994; Quintos, 1995). Hasil studi tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang apakah tata kelola pemerintahan dan sistem equitas merupakan variabel penting untuk meramalkan pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya. Kejelasan hubungan tersebut sangat penting untuk menjelaskan apakah dan bagaimanakah hubungan tersebut dibutuhkan dalam suatu proses pembangunan.

Literatur menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan, tetapi tidak bisa menjalankan fungsi redistribusi. Meningkatnya tata kelola akan digunakan untuk meningkatkan investasi yang produktif. Pemahaman tentang hubungan langsung antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan sebagai penyediaan informasi tentang pertumbuhan ekonomi terutama dalam proses pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah korupsi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ? 2) Apakah kemiskinan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ? 3) Apakah terjadi dampak kombinasi antara korupsi dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama dari penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data lintas negara. Tujuan khusus dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Melakukan analisis dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya, 2) Melakukan analisis dampak kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi ataukah sebaliknya, 3) Melakukan analisis kemungkinan terjadinya dampak kombinasi antara korupsi dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan analisis dampak hubungan kausalitas antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan analisis dampak hubungan kausalitas antara kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan analisis dampak kombinasi hubungan kausalitas antara korupsi dan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi.

Tidak ada definisi korupsi yang baku, hal ini disebabkan oleh sifat korupsi yang menyusup masuk dalam sebuah sistem, faktor-faktor korupsi dan motif korupsi berhubungan dengan banyak bidang. Menurut Worldbank, korupsi didefinisikan "*the abuse of public power for private benefit*", penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi (Tanzi, 1998, USAID, 1999). Transparansi Internasional (TI) sebuah LSM Internasional yang bergerak dibidang pemberantasan korupsi memberikan definisi tentang korupsi sebagai berikut:

"Perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka" (Transparency International; 2002).

Definisi di atas sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Prof. Robert Klitgaard yaitu: "menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi" (Klitgaard, 2002, 2). Sebelumnya Klitgaard memberikan definisi korupsi yang lebih khusus, yaitu:

"...Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya...(Klitgaard, 2001, XIX)."

Menurut Shleifer dan Vishny (1993), korupsi didefinisikan "*Government corruption as the Sale by Government officials of government property for personal gain*". Bardhan (1997) mendefinisikan korupsi "*The use of public office for private gain*". . Korupsi dapat dinotasikan secara sederhana $C = M + D - A$, di mana C: Corruption, M: Monopoli, D: Discretion, A: Accountability (Klitgaard, 2001, 99 dan 2002, 29). Berdasarkan model yang disusun oleh Klitgaard di atas menunjukkan bahwa korupsi akan menampakkan dirinya jika terjadi monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi, terjadinya penyimpangan kebijakan publik, dan tidak adanya pertanggungjawaban terhadap publik setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Korupsi tidak dapat hanya dipandang sebagai permasalahan ekonomi belaka, di mana kekayaan negara menjadi berkurang. Permasalahan sebenarnya lebih dari itu karena korupsi menyangkut aspek sosial budaya, politik, dan hankam. Aspek sosial-budaya berkaitan dengan rusaknya moral bangsa karena pejabat negara selalu berkeinginan untuk mendapatkan pendapatan lebih di luar haknya. Secara politik berkaitan tidak fairnya penentuan kebijakan-kebijakan publik, di mana yang mempunyai uang bisa mengatur hasil pilihan-pilihan publik. Keberadaan korupsi mengganggu pertahanan negara, jika keleluasan negara untuk mengatur kebijakan sesuai dengan tujuan nasional tidak bisa terlaksana dengan baik. Gejala sosial yang mungkin terjadi karena keirian sebagian masyarakat terhadap pejabat negara yang korup bisa menyebabkan gangguan keamanan nasional. Sehingga kebijakan yang harus ditempuh harus komprehensif dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas.

Secara ekonomi keberadaan korupsi akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan, sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapatan. Dengan menggunakan studi lintas negara Mauro (1995, 1997, 2004) menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan merusak investasi yang ada. Artinya jika korupsi meningkat maka investasi domestik akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Mauro (1997) menunjukkan juga bahwa tingginya tingkat korupsi akan menurunkan besarnya pengeluaran

pemerintah terutama dibidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik (*social security and welfare payments*). Penelitian Dewi (2002) menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi domestik, dan investasi asing langsung untuk negara-negara anggota ASEAN. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil dari penelitiannya Mauro.

Penelitian Mauro (1997) menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara lain: 1) Melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. 2) Terjadinya *talent miss allocated*. Artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. 3) Aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami miss alokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri, termasuk Indonesia. 4) Melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuantitas dan kualitas).

Tetapi tidak semua korupsi akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi, Leff (1964) dan Huntington (1968) mengindikasikan bahwa tidak semua korupsi berdampak buruk terhadap perekonomian. Korupsi yang bersifat "*speed money*" berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Argumen yang dikemukakan yaitu dengan keberadaan suap maka para pengusaha terhindar dari adanya penundaan birokrasi, sehingga semua urusan dengan birokrasi akan berjalan lancar yang berdampak terhadap semua kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana. Klitgaard (2001) tersedianya "dana taktis" pimpinan birokrat kadang-kadang diperlukan untuk mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

Banyak studi yang telah berusaha menjelaskan hubungan antara 1) korupsi dan pembangunan ekonomi, 2) korupsi dan pertumbuhan ekonomi, 3) korupsi dan kemiskinan (Bardhan, 1997; Tanzi, 1995, 1997a, UNDP, 1997; Mauro, 1995; Knack dan Keefer, 1996; Tanzi dan Davodi, 1997; dan Abed et al, 1998). Obyek penelitian tersebut berhubungan dengan hubungan kausal antara korupsi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan data panel lintas negara. Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Secara umum studi-studi tersebut tidak menjelaskan tentang kemiskinan.

Secara lebih rinci dalam Tanzi dan Davodi (1997) menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat korupsi akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam Gupta (1998) menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi, dan bukan karena disebabkan oleh bias simultan. Penelitian Gupta (1998) menghilangkan ukuran-ukuran kemiskinan dalam pembangunan, karena keterbatasan data penelitian (data kemiskinan selama 20 tahun kebelakang hanya tersedia untuk 40 negara). Menghilangkan variabel kemiskinan dalam analisis menyebabkan tidak mudah untuk melakukan assessment terhadap: 1) Hubungan negatif antara korupsi dengan pertumbuhan ekonomi dengan kontrol kemiskinan, 2) Korupsi dan pertumbuhan ekonomi memberi dampak yang independent terhadap pertumbuhan ekonomi, 3) Korupsi dan pertumbuhan ekonomi bermakna terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak mudah untuk mengidentifikasi dampak terpisah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Studi tentang korupsi dihadapkan kepada teori korupsi yang ambivalen serta determinan korupsi yang sangat *complicated* (Kuncoro, 2002, 80). Dalam suatu studi empiris peneliti biasanya dihadapkan kepada permasalahan data yang tidak lengkap atau bahkan tak

ada. Akses ke sumber-sumber data biasanya juga tidak mudah dilakukan, sehingga penelitian tentang korupsi biasanya bersifat *investigatif research*. Metode wawancara langsung juga tidak menjamin data yang akurat, karena jarang sekali orang bersedia mengungkapkan preferensi utiliti-nya

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian yaitu: analisis panel data dan *Seemingly Unrelated Regression* (SUR). Penggunaan data panel dalam penelitian ini disebabkan oleh keterbatasan data time series untuk setiap negara. Di samping secara teori analisis data panel memiliki kelebihan antara lain : 1) Estimasi data panel dapat mempertimbangkan heterogenitas dengan memperkenalkan variabel-variabel individu spesifik. 2) Data panel dapat memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, kurang kolinearitas antar variabel, derajat bebas yang lebih besar, dan lebih efisien. 3) Data panel lebih sesuai untuk mempelajari dinamika perubahan. 4) Data panel dapat secara lebih baik mendeteksi dan mengukur efek yang tidak dapat diamati dalam data *cross section* dan *time series*. 5) Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. 6) Data panel dapat meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu (Gujarati, 2003; Aulia 2003).

Dalam penelitian ini akan dilakukan estimasi terhadap model analisis data panel dengan menggunakan teknik *mixed fixed random effect model*. Jika berdasarkan pada analisis panel data, maka diasumsikan bahwa nilai semua parameter regresi yang didapat akan sama untuk semua negara. Sebuah pendekatan yang lebih fleksibel dengan menggunakan metode *seemingly unrelated regression* (SUR). Pendekatan SUR mengikuti perubahan parameter antar negara dalam penghitungan heteroskedastisitas dan *contemporaneous correlation* dalam *error* antar persamaan. Perumusan model untuk melakukan test terhadap terjadinya kausalitas dapat dituliskan dalam persamaan (1) sampai dengan (6).

Model Korupsi

$$\Delta COR_t = \alpha_1 + \sum_{k=1}^p \beta_{1,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{1,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{1,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_1 \mu_{t-1} + \varepsilon_{1,t} \dots \dots \dots (1)$$

$$H_0 : \gamma_{1,k} = 0; \phi_{1,k} = 0, \forall k = 1, \dots, q; \forall k = 1, \dots, l \text{ and } \Theta_1 = 0$$

$$\Delta COR_t = \alpha_2 + \sum_{k=1}^p \beta_{2,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{2,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{2,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_2 \mu_{t-1} + \varepsilon_{2,t} \dots \dots \dots (2)$$

$$H_0 : \gamma_{2,0} = 0; \phi_{2,0} \text{ and } \Theta_2 = 0$$

Model Kemiskinan

$$\Delta POV_t = \alpha_3 + \sum_{k=1}^p \beta_{3,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{3,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{3,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_3 \mu_{t-1} + \varepsilon_{3,t} \dots \dots \dots (3)$$

$$H_0 : \beta_{3,k} = 0; \gamma_{3,k} = 0, \forall k = l, \dots, p; \forall k = l, \dots, l \text{ and } \Theta_3 = 0$$

$$\Delta POV_t = \alpha_4 + \sum_{k=1}^p \beta_{4,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{4,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{4,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_4 \mu_{t-1} + \varepsilon_{4,t} \dots\dots (4)$$

$$H_0 : \beta_{4,0} = 0; \gamma_{4,0} = 0 \text{ and } \Theta_4 = 0$$

Model Pertumbuhan Ekonomi

$$\Delta GDP_t = \alpha_5 + \sum_{k=1}^p \beta_{5,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{5,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{5,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_5 \mu_{t-1} + \varepsilon_{5,t} \dots\dots (5)$$

$$H_0 : \beta_{5,k} = 0; \gamma_{5,k} = 0, \forall k = l, \dots, p; \forall k = l, \dots, l \text{ and } \Theta_5 = 0$$

$$\Delta GDP_t = \alpha_6 + \sum_{k=1}^p \beta_{6,k} \Delta COR_{t-k} + \sum_{k=1}^q \gamma_{6,k} \Delta GDP_{t-k} + \sum_{k=1}^l \phi_{6,k} \Delta POV_{t-k} + \Theta_6 \mu_{t-1} + \varepsilon_{6,t} \dots\dots (6)$$

$$H_0 : \beta_{6,0} = 0; \gamma_{6,0} = 0 \text{ and } \Theta_6 = 0$$

Dimana $i = 1 \dots N$, $t = 1 \dots T$, i adalah jumlah negara dan T adalah jumlah tahun, COR adalah korupsi, POV adalah kemiskinan, dan GDP adalah pertumbuhan ekonomi.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data tentang korupsi berasal dari *International country Risk Guide* (ICRG) dan *Bussines International* (BI) dari tahun 1980 – 1995. ICRG indeks melakukan *asesment* pada investor asing tentang derajat korupsi sebuah negara. Indeks ICRG dan BI menggunakan skala 0 (*most corrupt*) – 10 (*least corrupt*). Di samping itu akan digunakan pula *Corruption Perception Index* (CPI) dari *Transparency International* (TI) dari tahun 1995 -2007. Untuk mengukur tingkat kemiskinan akan digunakan *head count index* (HCI). Sedangkan ukuran pertumbuhan ekonomi akan digunakan pendapatan per-kapita. Data HCI dan pendapatan per-kapita bersumberkan dari data terbitan Bank Dunia dalam *World Development Indicator* (WDI). Jumlah negara yang akan dilakukan sebagai sampel sekitar 100 negara yang tersebar di lima benua, baik negara maju maupun negara sedang berkembang.

HASIL

Pada bagian ini akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dispesifikasikan. Hasil analisis estimasi model dapat dilihat pada tabel 1. Dimana data variabel korupsi (COR) merupakan kompilasi dari data ICRG dan CPI, sedangkan *head count index* akan digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan (POV). Analisis akan dilakukan terhadap model SUR pada model pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi.

Berdasarkan hasil estimasi dengan teknik *mixed fixed random effect model*, maka persamaan regresi menunjukkan bahwa variabel kemiskinan (POV) mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan dengan tingkat kemiskinan tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sedangkan untuk negara yang mempunyai tingkat kemiskinan yang rendah akan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lebih lanjut hasil analisis

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan.

Tabel 1
Hasil Estimasi Mixed Fixed-Random Effect Model

Variabel	Model Pertumbuhan Ekonomi	Model Kemiskinan	Model Korupsi
Konstanta	9,254 (0,169)	1,086 (0,132)	24.011 (0,623)
COR _{t-1}	0,387 (0,533)	-0,065 (0,179)	-0,473 (0,941)
POV _{t-1}	-0,201* (0,049)	0,001 (0,242)	-0,417* (0,000)
GDP _{t-1}	0,147 (0,115)	0,009 (0,185)	1,457 (0,577)

Keterangan: Tanda dalam kurung () menunjukkan nilai probabilitas dan tanda *) menunjukkan signifikan pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan model Korupsi menunjukkan bahwa lagged GDP mempunyai dampak signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi. Sedangkan kemiskinan tidak berdampak signifikan terhadap korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak berdampak kepada korupsi dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan model kemiskinan menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Jika *Corruption Perception Index* (CPI) mengukur dengan skala 1 – 10, dimana ranking 1 mengindikasikan tingkat korupsi tinggi dan ranking 10 mengindikasikan tingkat korupsi yang rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada negara yang relatif lebih rendah tingkat korupsinya akan mengurangi kemiskinan. Sedangkan untuk negara yang lebih tinggi tingkat korupsinya maka akan berdampak meningkatkan tingkat korupsi yang terjadi.

Hasil Estimasi *Granger Causality Test*

Tabel 2 menunjukkan hasil dari *granger causality test*. Hasil kesimpulan hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap kemiskinan dan kemiskinan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2
Hasil Granger Causality

Hipotesis	Koefisien
Kemiskinan <u>Mempengaruhi</u> Korupsi	2,140 (0,125)
Pertumbuhan Ekonomi <u>Mempengaruhi</u> Korupsi	0,310 (0,577)
Korupsi Mempengaruhi <u>Pertumbuhan</u> Ekonomi	0,390 (0,533)
Pertumbuhan Ekonomi <u>Mempengaruhi</u> Korupsi	4,030* (0,022)
Kemiskinan <u>Mempengaruhi</u> Korupsi	1,390 (0,242)

Hipotesis	Koefisien
Korupsi <u>Mempengaruhi</u> Kemiskinan	3,170* (0,048)
Korupsi dan Kemiskinan <u>Mempengaruhi</u> Pertumbuhan Ekonomi	1,930 (0,114)
Korupsi dan Pertumbuhan <u>Ekonomi Mempengaruhi</u> Kemiskinan	1,940 (0,112)
Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi <u>Mempengaruhi</u> Korupsi	2,530* (0,047)

Keterangan: Tanda dalam kurung () menunjukkan nilai probabilitas dan tanda *) menunjukkan signifikan pada $\alpha = 5\%$

Hasil hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak terhadap korupsi. Hal ini menyebabkan kausalitas yang terjadi adalah satu arah. Informasi yang telah lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak meningkatkan korupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara yang relatif kaya mempunyai tingkat korupsi lebih rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara yang relatif lebih miskin.

Hubungan antara kemiskinan dengan korupsi menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi bersifat dua arah. Kemiskinan tidak berdampak terhadap korupsi tetapi korupsi berdampak pada kemiskinan. Hubungan antara korupsi, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa kombinasi korupsi dan kemiskinan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel korupsi dan kemiskinan berpengaruh dalam menentukan peramalan pertumbuhan ekonomi di masa datang. Dampak kombinasi korupsi dan kemiskinan merupakan variabel yang layak untuk dipertimbangkan di masa depan.

Dampak kombinasi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan korupsi menunjukkan bahwa kombinasi antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi. Informasi yang cukup tentang kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di masa lalu sangat penting untuk meramalkan korupsi di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Kemiskinan tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi. 3) Kemiskinan tidak berdampak terhadap korupsi, dan korupsi tidak berdampak terhadap kemiskinan. 4) Kombinasi kemiskinan dan korupsi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. 5) Kombinasi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berdampak terhadap korupsi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 1) Variabel kemiskinan dan korupsi perlu diperhitungkan dalam melakukan peramalan terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. 2) Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya digunakan data korupsi yang berasal dari sumber yang sama untuk menghindari bias interpretasi. 3) Dalam penelitian selanjutnya model dapat augmented dengan memasukan variabel ekonomi makro misalnya inflasi, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan sebagai variabel control.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daro dan Verdier Thierry. The Choice Between Market Failures And Corruption. *The American Economic Review*, Vol. 90. No.1, hal. 194 – 211. 2000.
- Ahlin, Christian R. “Corruption: Political Determinants and Macroeconomics Effect.” Vanderbilt Univesity Working Paper No. 01 - W26, 2001.
<http://www.vanderbilt.edu/econ>
- Alatas, Syed Hussein. “Corruption and the Destiny of Asia.” Prentice Hall, Malaysia, 1999.
- Andvig, Jens Chr, Odd-Helge Fjeldstad, Inge Amundsen, Tone Sissener, dan Tina Soreide. “*Research on Corruption: A Policy Oriented Survey*.” Norwegian Agency for Development (NORAD), 2000.
- Bardhan, Pranab. “The Role Of Government in Economic Development: A Political Economic Approach.” OECD Development Centre, Paris, 1997.
- Charap, Joshua dan Harm Cristian. “Institutionalized Corruption And The Kleptocratic State.” IMF Working Paper. WP/99/91, Juli, 1999.
- Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, Bertram Spector “Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature.” Management Systems International, 2003.
- Coolidge, Jacqueline dan Ackerman, Susan Rose.” High-Level Rent Seeking And Corruption In African Regime.” World Bank Staff Paper, 1996.
- Dewi, Siti Nurfitriah Farah. “Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995 – 2000).” Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2002.
- Ginting, Edimon. ”Tax Evasion in A Corrupt Economy”. *General Paper No. G - 133, Centre for Policy Studies*, Monash University, Oktober, 1999.
- Glaeser, Edward L dan Claudia Goldin. ”Corruption and Reform: An Introduction.” NBER Working Paper No. 10775, 2004.
<http://www.nber.org/papers/w10775.pdf>
- Gupta, S., Davoodi, H, and Alonso, R.T. ‘Does Corruption Affect Inequality and Poverty ?’, IMF Discussion paper, WP/98/76 1998.
- Hart, Natasha Hamilton.”Anti_Corruption Strategis in Indonesia. ”*Bulletin of Indonesian Economic Studies*.” Vol. 37, No. 1, April, 2001.

- Henderson, J. Vernon. "Corruption in Indonesia." *NBER Working Paper Series No. 10674*, 2004. <http://www.nber.org/papers/w10674>
- Ismalina, Poppy. "Transnational Corporations (TNCs)" Terlibat Korupsi Demi Penguasaan Ekonomi." *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA Edisi 14. th.III*, 2002.
- Klitgaard, Robert, Maclean-Abaroa, Ronald dan Parris, H. Lindsey. "*Corrupt Cities: A Parctical Guide To Cure and Prevention*." (Terjemahan Masri Maris: Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah), Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Klitgaard, Robert. "*Controlling Corruption*." (Terjemahan Hermoyo: Membasmi Korupsi) Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Knack, S., and Keefer, P. 'Institutions and Economic Performance', *Economics and Politics*, 7, pp. 207-227, 1996.
- Kuncoro, Ari. "Corruption And Economic Growth In Indonesia." *Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, Vol. XLX, No. 1, Tahun 2002.
- Lambsdorff, Johann Garf. "Corruption in Empirical Research - A Review." Transparency International Working Paper, 1999.
- Lui, Francis T. A Dynamic Model of Corruption Deterrence, *Journal of Public Economics*, hal. 215-236, 1986.
- Marjit, Sugata dan Mukherje, Arijit. "A Simple Theory of Harassement And Corruption." University Of Hongkong Working paper, 1996. <http://www.cuhk.hk>.
- Mauro, P. "Corruption and Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 110, 681-712, 1995.
- Mauro, P.. 'Corruption and Growth', *Quarterly Journal of Economics*, 110, pp. 681-712, 1995.
- Mauro, P.. 'The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure: A Cross-Sectional Analysis', in *Corruption and the Global Economy*, Ed. by Kimberly Ann Elliott (Washington, D.C., USA) , 1997.
- Mauro, Paolo. "Why Worry About Corruption ?" *Economic Issues No. 6*, IMF, Washington DC, 1997.
- Mauro, Paolo. "The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth." IMF Staff Paper No. 51 No. 1, Washington DC, 2004.
- Pope, Jeremy. "Confronting Corruption: The Elemen of National Integrity System." Terjemahan: Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, 2003.

- Quintos, C.E.. 'Sustainability of the deficit process with structural shifts', *Journal of Business and Economic Statistics*, 13, pp. 409-417, 1995.
- Rahardjo, Dawam. "KKN: Kajian Konseptual dan Sosio Cultural." Dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Penerbit Aditya Media, Maret, 1999.
- Sanyal, Amal, Gang N. Ira dan Goswami, Omkar. "Corruption, Tax Evasion and Laffer Curve." Public Choice Centre Working Paper, George Mason University, 1998.
- Shi, Shouyong dan Temzelides, Ted. "A Search-Theoretic Model of Bureaucratic And Corruption." *NBER Working Paper*, 2003.
- Shleifer, Andrei dan Vishny, R.W. "Corruption." *Quarterly Journal of Economics* Vol. 108 No.3, August, 1993.
- Tanner, E, and Liu, P.. 'Is the budget deficit 'too large'?: some further evidence', *Economic Inquiry*, 32, pp. 511-518, 1994.
- Tanzi, V., and Chu, K. *Income Distribution and High-Quality Growth*, Cambridge, MIT Press, 1998.
- Tanzi, V., and Davoodi, H 'Corruption, Public Investment, and Growth', IMF Working Paper, 97/139 (Washington, IMF) , 1997.
- Tanzi, Vito. "Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope And Cures." *IMF Staff Papers*, Vol. 45. No. 4, 1998.
- USAID. "A Handbook on Fighting Corruption." Center for Democracy and Governance, Bureau for Global Programs, Field Support, and Research U.S. Agency for International Development (USAID), Washington DC, February, 1999.
- Ventelou, Bruno. "Corruption In a Model of Growth: Political Reputation, Competition and Shocks." *Journal of Public Choice*, hal. 23 – 40, 2002.